

## PENGARUH ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BULUNGAN

Nur Fitriyani<sup>1</sup>, Ana Srikaningsih<sup>2</sup>  
STIE Bulungan Tarakan<sup>1,2</sup>

vhitry2@gmail.com<sup>1</sup>, srikaningsih.ana@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstract

*This research aims to examine whether the budget allocation for infrastructure development has a significant effect on economic growth in the Bulungan district. To analyze the relationship among dependent and independent variable under this study used simple linear regression method. Taken from the result of this study can be concluded that when budget allocation of infrastructure development is constant then the economic growth in the Bulungan district as 4,973 percent. Budget allocation of infrastructure development on Economic growth in the Bulungan district get rise, the Economic growth in the Bulungan district will be increase. And contribution of Budget allocation of infrastructure development variable on economic growth in the Bulungan district only 44,5 percent. Based on the result, then can be suggested to the Government of Bulungan District to intensifying strategic infrastructure budget such as infrastructure under agriculture sector, road and bridge infrastructure, able to open the isolation of each region which still experience obstacle in marketing their own crops. Beside enlarge the infrastructure development budget, it be expected that the government make controlling and supervision in detail on the determined budget so the infrastructure development budget be right on the target it be able to trigger the economic growth. Government of Bulungan District become more selective in positioning each structural officials in each stage of official position in order to have performance and loyalty to the leader and synergy in developing Bulungan district economy. Developing the potential of Bulungan District at present does not managed professionally like tourism sector, to adding government income source in turn it can be generate the economic growth.*

**Keywords :** *infrastructure budget allocation, economic growth*

### PENDAHULUAN

Pada dasarnya suatu pembangunan bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Canning dan Pedroni, (2004) menyatakan bahwa efek dari tersedianya infrastruktur sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Salah satu bentuk infrastruktur adalah sarana jalan dan ketersediaan air bersih. Akses yang sulit, dan pemeliharaan terhadap fasilitas infrastruktur yang kurang menyebabkan, pengelolaan air bersih menjadi salah satu masalah yang paling mendesak di Indonesia (McCawley, 2015).

Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pembangunan membutuhkan pendekatan yang tepat, guna menghasilkan pertumbuhan yang disertai pemerataan. Infrastruktur berperan penting dalam peningkatan investasi dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan.

Sukirno, (2012:432) menyebutkan bahwa kemakmuran ditentukan pula oleh fasilitas untuk mendapatkan suplai listrik dan air minum atau bersih, fasilitas pendidikan yang diperoleh dan taraf pendidikan yang dicapai, tingkat kesehatan dan fasilitas

perobatan yang tersedia, keadaan perumahan masyarakat miskin dan taraf perkembangan infrastruktur yang dicapai. Infrastruktur juga memiliki keterkaitan dengan ketenagakerjaan, Nugraheni, (2012) menyatakan bahwa belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah dapat berkontribusi pada perekonomian regional apabila benar – benar diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diyakini mampu menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi.

Pembangunan infrastruktur yang meliputi transportasi, ketenagalistrikan, energi, pos, telekomunikasi, informatika, sumberdaya air, perumahan, pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan mengalami kesenjangan dalam pemerataannya, baik kuantitas dan kualitasnya. Dapat dikatakan disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari kesejahteraan infrastruktur.

Untuk itu pembangunan infrastruktur disamping mempertimbangkan pilar ekonomi juga pilar sosial budaya dan lingkungan sebagai suatu kesatuan agar berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur menuntut pemenuhan berbagai komabilitas atau

keseerasian penanganan, yaitu secara spasial: infrastruktur nasional, regional, perkotaan, dan perdesaan, pada setiap sektor, yakni transportasi jalan, sumber daya air, maupun perumahan dan permukiman, Pertambangan dan Energi serta Perhubungan; pada sektor publik dalam menetapkan kebijakan dan program; pada sektor swasta dalam partisipasinya pada penyelenggaraan industri dan jasa pelayanan infrastruktur; serta masyarakat sendiri dalam partisipasinya pada proses pembangunan, penggunaan dan pengawasan. Dalam hal ini pendekatan pengembangan wilayah dinilai sanggup memenuhi berbagai tuntutan komabilitas tersebut. Pendekatan pembangunan infrastruktur ke depan dengan menggunakan metode berbasis wilayah ini semakin penting untuk diperhatikan.

Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah dan prasyarat kesuksesan pembangunan ekonomi. Wilayah yang memerlukan penanganan khusus dan berkelanjutan dapat terlihat dari rendahnya daya serap pembangunan bidang infrastruktur di daerah tersebut. Berikut ini merupakan gambaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bulungan 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 1 Gambaran Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bulungan tahun 2015

No	Kecamatan	Transportasi	PLTN/PLTS
1	Tanjung Selor	149,245 km (21,89%)	6.009 KK/ (88,95%)
2	Tanjung Palas Timur	77,028 km (11.30%)	1.840 KK (47,73%)
3	Tanjung Palas Barat	37,086 km (5.44%)	991 KK (77%)
4	Peso Hilir	57,885 km (8,49%)	64 KK (9.68%)
5	Peso	65.400 km (9.59%)	648 KK (77.98%)
6	Tanjung Palas Tengah	10.640 km (1.56%)	544 KK (43.90%)
7	Tanjung Palas Utara	81.520 km (11.96%)	1.116 KK (56.77%)
8	Sekatak	15.605 km (2.29%)	541 KK (36.98%)
9	Sesayap Hilir	22.800 km (3.34%)	159 KK (22.36%)
10	Sesayap	21.865 km (3.21%)	660 KK (54.64%)
11	Bunyu	24.892 km (3.65%)	1.888 KK (74.74%)
12	Tanah Lia	26.775 km (3.93%)	323 KK (81.56%)

Sumber: <http://bappedabulungan.blogspot.co.id/> diakses tanggal 7 april 2017 13:04 wita

Kesenjangan pembangunan antara daerah kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain telah

menyebabkan konsentrasi penduduk terpusat pada daerah-daerah yang mengalami pembangunan yang

cukup tinggi, akibatnya menimbulkan kesenjangan perekonomian antara daerah/kecamatan pembangunan yang tinggi dibandingkan dengan daerah/kecamatan yang belum terjangkau sepenuhnya oleh kegiatan pembangunan seperti antara pembangunan wilayah pantai dengan wilayah pedalaman dan antara pusat pemerintahan dengan wilayah pedesaan.

Permasalahan di atas juga ditandai oleh semakin meluasnya kebijakan untuk memutuskan hubungan kerja karena tutupnya beberapa perusahaan di bidang kehutanan, semakin meningkatnya angka pengangguran, semakin sempitnya lapangan kerja di daerah, semakin melemahnya daya saing pengusaha daerah yang disebabkan oleh lemahnya daya saing daerah. Selanjutnya masih terdapat ketimpangan pengembangan wilayah di Kabupaten Bulungan yaitu antara wilayah terisolir, terpencil dan daerah perkotaan. Pengembangan wilayah terisolir dan terpencil menjadi prioritas, dan secara politis akan mendukung rasa persatuan dan kesatuan bangsa, karena pemerataan hasil pembangunan akan terjadi sampai ke pelosok wilayah.

#### KAJIAN PUSTAKA

S. Kuznet (1966) dalam Jhingan, (2013) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Prof. Bauer menunjukkan bahwa penentuan utama pertumbuhan ekonomi adalah bakat, kemampuan, kualitas, kapasitas dan kecakapan, sikap, adat-istiadat, nilai, tujuan dan motivasi, serta struktur politik dan kelembagaan.

Menurut Rostow dalam Todaro dan Smith, (2006:35) Perubahan dari keterbelakangan menuju kemajuan ekonomi dapat dijelaskan dalam suatu seri

tahapan yang harus dilalui oleh semua negara. Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi tersebut, yaitu masyarakat tradisional, prasyarat untuk lepas landas, lepas landas, gerakan kearah kedewasaan, dan masa konsumsi tinggi. Dalam membedakan kelima tahap tersebut Rostow menggolongkannya berdasarkan pada ciri-ciri perubahan keadaan ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi. Menurut Rostow pembangunan ekonomi atau transformasi suatu masyarakat tradisional menuju masyarakat modern merupakan suatu proses yang multidimensional. Dimana perubahan ini bukan hanya bertumpu pada perubahan ekonomi dari agraris ke industri saja, melainkan juga perubahan pada sosial, budaya, politik, ekonomi bahkan agama.

Infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diartikan sebagai fasilitas publik yang meliputi jalan, rumah sakit, jembatan, air, telepon, tenaga listrik dan lain – lain. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari publik capital yang dibentuk dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah (Hapsari, 2011).

Suatu pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, serta memiliki peran penting di suatu daerah dalam memperlancar kegiatan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah diyakini dapat menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi (Nugraheni, 2012). Sektor infrastruktur merupakan faktor utama yang induktif yang dapat memperlancar aktivitas ekonomi di Malaysia (Suleiman dan Albiman, 2014). Haughwot, (2001) menyatakan bahwa infrastruktur secara signifikan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial pada perkotaan di Amerika. Menurut Kurniawan (2014) infrastruktur jalan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, kondisi permukaan jalan sangat signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan di

suatu wilayah. Peningkatan kualitas permukaan jalan akan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi dan akhirnya mampu meningkatkan pendapatan penduduk.

Penelitian yang terkait dengan pengaruh alokasi anggaran pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dilaksanakan oleh Maryaningsih, dkk., (2014) menyatakan bahwa: *pertama*, resiliensi pertumbuhan ekonomi Indonesia telah berhasil meningkatkan rata-rata pendapatan per kapita riil nasional. *Kedua*, meskipun pendapatan per kapita riil nasional telah meningkat, namun belum terdapat pemerataan pendapatan per kapita riil antar provinsi di Indonesia. *Ketiga*, terdapat indikasi *b-convergence* dengan kecepatan konvergensi sebesar 1,75% atau setara dengan *halflife* sekitar 41,14 tahun. Dengan demikian, provinsi-provinsi dengan pendapatan per kapita riil lebih rendah tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi dengan pendapatan per kapita riil lebih tinggi. *Keempat*,  $\sigma$ -*convergence* belum terjadi dalam perekonomian nasional Indonesia, yang artinya masih terdapat ketimpangan pendapatan per kapita riil antar provinsi di Indonesia. *Kelima*, kondisi infrastruktur jalan dan listrik berdampak signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita, namun tidak demikian dengan pelabuhan. *Terakhir*, investasi terbukti secara empiris

sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

#### METODE

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan tahun 2011-2015 dan data alokasi anggaran pembangunan infrastruktur Kabupaten Bulungan tahun 2011-2015.

Pengelolaan data yang dipilih untuk mengetahui besarnya pengaruh perubahan antara variabel satu dengan variabel lainnya yaitu dengan menggunakan alat analisis regresi linear sederhana.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur Kabupaten Bulungan cenderung meningkat di tahun 2011-2013 dan mengalami penurunan pada tahun 2014-2015. Pada tahun 2012 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur Kabupaten Bulungan mengalami peningkatan sebesar 34.26 persen, pada tahun 2013 meningkat sebesar 90.51 persen, dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar -15.87 persen dan -32.99 persen pada tahun 2015.

Tabel 2 Alokasi Anggaran Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bulungan tahun 2011-2015

Tahun	Konstruksi Jalan (Rp)	Konstruksi Jembatan (Rp)	Konstruksi Jaringan Air (Rp)	Konstruksi Listrik dan Telepon (Rp)	Jumlah Alokasi Infrastruktur (Rp)
2011	207,179,921,552.69	26,942,883,412.00	112,956,957,257.50	3,499,975,218.00	350,579,737,440.19
2012	224,050,028,091.60	35,232,403,760.00	170,435,512,825.38	41,000,902,100.00	470,718,846,776.98
2013	456,662,541,208.94	71,838,925,200.00	284,500,126,548.21	83,772,542,046.00	896,774,135,003.15
2014	388,102,942,581.50	71,442,041,530.75	231,069,623,893.85	63,779,017,250.00	754,393,625,256.10
2015	325,931,044,916.56	55,720,609,917.00	83,542,792,319.50	40,270,792,195.00	505,465,239,348.06

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bulungan

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian, makin meningkat usaha pembangunan menuntut pola

peningkatan pembangunan jalan untuk daerah ke daerah lain. Panjang jalan di wilayah Kabupaten Bulungan pada tahun 2011 mencapai 857.220 km

termasuk dalam kategori jalan kelas III C yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten, pada tahun 2012 mencapai 932.803 km, pada tahun 2013 mencapai 960.467 km, pada tahun 2014 mencapai 1.003.683 km.

Panjang jalan kabupaten jika dirinci menurut jenis permukaan adalah pada tahun 2011 untuk permukaan yang diaspal 205.630 km, permukaan kerikil 222.110 km, dan permukaan tanah 429.480 km. Pada tahun 2012 untuk permukaan yang diaspal 516.192 km, permukaan kerikil 213.179 km, dan permukaan tanah 201.065 km. Pada tahun 2013 untuk permukaan yang diaspal 513.667 km, permukaan kerikil 231.256 km, dan permukaan tanah 213.168 km. Pada tahun 2014 untuk permukaan yang diaspal 525.648 km, permukaan kerikil 281.661 km, dan permukaan tanah 192.412 km.

Dalam menyongsong era globalisasi sekarang ini, sektor Pos dan Telekomunikasi sangat diperlukan dalam memperlancar arus berita, informasi, dan data. Telepon sebagai salah satu sarana telekomunikasi memiliki arti penting bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah pelanggan maupun jumlah sarana telekomunikasi lainnya setiap tahun dengan jumlah pelanggan telepon sebanyak 4.214 pada tahun 2014.

Di Kantor Pos Tanjung Selor jumlah pengiriman surat dan pos paket pada tahun 2014 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengiriman surat dan pos paket tahun 2013 sebanyak 15.376 menjadi 14.692 pada tahun 2014 yang terdiri dari 2.889 surat biasa, 1.020 surat tercatat, 8.893 surat kilat, dan 1.891 pos paket.

Sebagian besar kebutuhan listrik di Kabupaten Bulungan dipenuhi oleh PT Perusahaan Listrik Negara

(PLN). Sementara sebagian lagi disuplai secara swasembada oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Pada tahun 2014, total daya terpasang sebanyak 21.541 KW dengan tenaga listrik yang diproduksi 63.968.122 KWH. Sementara itu listrik yang terjual sebanyak 61.529.497 KWH. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 16,12 persen.

Tenaga listrik yang terjual untuk tahun 2014, sebagian besar digunakan untuk pelanggan rumah tangga sebanyak 40.031.746 KWH. Sedangkan untuk kategori pelanggan usaha menggunakan listrik sebanyak 9.297.563 KWH, pelanggan industri sebanyak 2.505.055 KWH, pelanggan sosial sebanyak 2.778.797 KWH, pelanggan pemerintah sebanyak 5.766.964 KWH, dan pelanggan layanan khusus sebanyak 1.149.372 KWH.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan produksi barang dan jasa suatu waktu tertentu. Ini penting untuk mengetahui kinerja pembangunan yang telah dilakukan dan untuk menentukan arah serta rencana pembangunan suatu daerah. Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara riil yang terjadi setiap tahun dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap perkembangan angka PDRB atas dasar harga konstan, Angka ini memiliki makna untuk menjelaskan apakah ada peningkatan atau penurunan dari kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah tiap tahunnya. Perekonomian Kabupaten Bulungan sangat dipengaruhi oleh nilai tambah yang tercipta di sektor Pertambangan dan Penggalan, Pertanian serta Jasa-jasa.

Tabel 3 PDRB Kabupaten Bulungan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2011-2015

Tahun	PDRB (juta rupiah)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2011	10.049.307,17	9.00

2012	11.516.445,91	7.93
2013	12.028.979,64	5.37
2014	12.725.131,67	4.94
2015	12.819.168,92	3.26

Sumber: Bulungan dalam angka

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan selama kurun waktu 2011 sampai 2015 sebesar 5.28 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 sebesar 9.00 persen, pada tahun 2012 sebesar 7.93 persen, pada tahun 2013 sebesar 5.37 persen, pada tahun 2014 sebesar 4,94 persen dan pada tahun 2015 sebesar 3.26 persen.

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Bulungan selama kurun waktu 2011-2015 memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat, yaitu dari 64,82 juta rupiah per orang per tahun pada tahun 2011 menjadi 101,26 juta rupiah per orang pada tahun 2015. Namun perlu diketahui bahwa pendapatan per kapita tersebut belum mencerminkan tingkat kesejahteraan sesungguhnya. Hal ini dikarenakan pendapatan per kapita diperoleh berdasarkan PDRB dikurangi dengan penyusutan, pajak tak langsung, dan pendapatan neto dari luar daerah.

Salah satu misi pembangunan Kabupaten Bulungan adalah mempercepat peningkatan infrastruktur dasar, dan hal ini sejalan dengan salah satu visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan aksesibilitas wilaya. Misi tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur merupakan salah satu factor kunci dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis pengujian dapat diketahui  $t\text{-hitung } 1,59 < t\text{-tabel } 3,18$  dan nilai signifikansi  $0.2117 > 0.05$  yang berarti alokasi anggaran pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan. Hasil analisis ini mengisyaratkan bahwa investasi pemerintah kabupaten

Bulungan pada infrastruktur belum tepat sasaran dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Kontribusi infrstruktur terhadap pertumbuhan ekonomi baru mencapai 45, 5 %, hal ini menunjukkan bahwa misi pembangunan kabupaten Bulungan mempercepat peningkatan infrastruktur sangatlah tepat untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Sibarani pada tahun 2002 tentang kontribusi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menyimpulkan bahwa infrastruktur (jalan, listrik, telepon) memberikan pengaruh yang signifikan dan positif pada agregat output yang diwakili oleh variabel pendapatan per kapita. Kontribusi setiap jenis infrastruktur untuk setiap wilayah berbeda. Untuk estimasi dengan data semua provinsi di Indonesia hasil yang diperoleh yaitu elastisitas listrik pada pertumbuhan yaitu 0,06; pendidikan 0,07; investasi 0,01. Variabel jalan dan telepon tidak signifikan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur yang terpusat di pulau Jawa dan Indonesia Bagian Barat (IBB) menimbulkan disparitas pendapatan perkapita di masing-masing daerah di Indonesia, terutama antara pulau Jawa dengan luar Jawa dan Indonesia Bagian Barat (IBB) dengan Indonesia Bagian Timur (IBT), meskipun pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi meningkat.

## KESIMPULAN

1. Pada saat alokasi anggaran pembangunan infrastruktur konstan maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan sebesar 4,973 persen.

2. Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan bernilai positif yang berarti jika alokasi anggaran pembangunan infrastruktur meningkat, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan akan mengalami peningkatan.
3. Kontribusi variabel alokasi anggaran pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan hanya 44,5 persen.

#### Daftar Pustaka

- BAPPEDA Kabupaten Bulungan. (2015). Gambaran Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bulungan tahun 2015. Retrieved April 13, 2017, from <http://bappedabulungan.blogspot.co.id/>
- Canning, D., & Pedroni, P. (2004). The Effect of Infrastructure on Long Run Economic Growth. *Harvard University*, 99(9), 1 – 30.
- Hapsari, T. (2011). *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Haughwot, A. F. (2001). Infrastructure and Social Welfare in Metropolitan America. Retrieved March 25, 2017, from <http://www.newyorkfed.org>
- Jhingan, M. L. (2013). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (15th ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, D. A. (2014). Peran Transportasi Jalan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Simposium XXI FSTPT*. Surabaya: Universitas Petra.
- Maryaningsih, N., Hermansyah, O., & Savitri, M. (2014). Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 12(1).
- McCawley, P. (2015). Infrastructure Policy in Indonesia, 1965 – 2015: A Survey. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(2), 263 – 85.
- Nugraheni, D. (2012). *Kinerja Keuangan Daerah, Infrastruktur, Kemiskinan: Analisis Kabupaten/Kota Di Indonesia 2006 – 2009*. Institut Pertanian Bogor.
- Sukirno, S. (2012). *Pengantar Teori Makroekonomi* (2nd ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Suleiman, N. N., & Albiman, M. M. (2014). Dynamic Relationship Between Tourism, Trade, Infrastructure and Economic Growth: Emperical Evidence from Malaysia. *Journal of African Studies and Development.*, 6(3), 49 – 55.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.